

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi. Pada bab ini peneliti akan memaparkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan dari penelitian ini dikemukakan oleh peneliti sebagai analisis temuan penelitian dan pembahasan yang telah dikaji pada bab IV. Simpulan tersebut akan dipaparkan ke dalam dua bagian yakni simpulan umum dan simpulan khusus yang ditulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Implikasi dan rekomendasi dalam bab ini akan dipaparkan setelah penulisan simpulan penelitian. Implikasi dan rekomendasi tersebut diajukan oleh peneliti agar hal-hal penting dari penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Program Desa Sadar Hukum (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)” dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Adapun implikasi yang dipaparkan merupakan penjabaran dari peneliti mengenai dampak yang dihasilkan dari penelitian tersebut dan rekomendasi ditujukan bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam bidang yang terkait. Simpulan, implikasi, dan rekomendasi akan dijelaskan di bawah ini.

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait Implementasi Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan membuat peneliti dapat menyimpulkan bahwa, secara umum, program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun dalam pelaksanaan program masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut menjadi kendala dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diatasi untuk mencapai pelaksanaan yang lebih maksimal. Meskipun demikian,

pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan sudah cukup efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan Desa Trusmi Wetan.

5.1.2. Simpulan Khusus

Simpulan khusus dalam penelitian ini akan dipaparkan sesuai fokus penelitian atau rumusan masalah yang telah dijawab pada bab IV. Adapun simpulan-simpulan tersebut di antaranya:

1. Perencanaan program desa sadar hukum yang telah dilaksanakan oleh BPHN sebagai panitia pusat yang dilakukan lebih lanjut oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat selaku panitia daerah provinsi sudah cukup baik. Perencanaan dilaksanakan secara sistematis, artinya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai panitia pelaksana sudah membuat perencanaan yang matang dari segi penyusunan rancangan kegiatan/penjadwalan, penyusunan strategi pelaksanaan, perincian prosedur operasional program, hingga menentukan sistem evaluasi program. Desa Trusmi Wetan sebagai calon desa sadar hukum juga telah melakukan persiapan yang baik dari kelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan pengumpulan data-data terkait, namun tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa Trusmi Wetan mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam persiapan mengikuti program desa sadar hukum, salah satunya adalah tidak terbentuknya kelompok Kadarkum.
2. Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan diawali dengan penetapan menjadi desa binaan dengan diusulkan terlebih dahulu oleh oleh Camat Plered kepada Bupati Cirebon, setelah dinilai memenuhi persyaratan dan ditetapkan melalui SK untuk menjadi desa binaan, Aparat Desa Trusmi Wetan mengirimkan data yang telah terkumpul ke Bagian Hukum Kabupaten Cirebon, data yang telah terkumpul di Bagian Hukum Kabupaten akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Kegiatan selanjutnya pembinaan yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan penyuluhan. Adapun penyuluhan yang diadakan di Desa Trusmi Wetan yaitu penyuluhan dari Dinas Pendapatan Daerah mengenai

pentingnya pelunasan PBB, penyuluhan hukum dari Polsek Plered mengenai bahaya judi, miras, dan narkoba, penyuluhan tentang pengelolaan sampah dan limbah, serta pembinaan keamanan kepada LINMAS dari Polsek Plered dan Koramil. Kegiatan penyuluhan di atas di laksanakan pada waktu yang berbeda-beda dan diikuti dengan monitoring dari Bagian Hukum Kabupaten Cirebon. Kegiatan selanjutnya yaitu monitoring langsung yang dilakukan oleh Petugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ke Desa Trusmi Wetan. Pada kegiatan monitoring, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melakukan pengecekan untuk melihat kesesuaian data dan fakta di lapangan. Hasil monitoring akan digunakan dalam penilaian desa sadar hukum. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi program secara keseluruhan. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melakukan evaluasi program desa sadar hukum berdasarkan beberapa kriteria yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun dari segi efektivitas, pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan cukup efektif, karena dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.

3. Hambatan yang dirasakan oleh beberapa *stakeholders* dalam pengimplementasian program desa sadar hukum berbeda-beda. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat mengemukakan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program yaitu keterbatasan sumber daya berupa dana dan fasilitas dalam pelaksanaan program desa sadar hukum serta terkait pengumpulan data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bagian Hukum Kabupaten Cirebon mengemukakan beberapa kendala, yaitu keterlambatan dalam pengumpulan data dan masalah teknis pelaksanaan program yang tidak dimengerti oleh beberapa aparat desa. Adapun kendala yang dirasakan langsung oleh Aparat Desa Trusmi Wetan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum yaitu terkait penumpukan sampah pada beberapa lokasi di Desa Trusmi Wetan yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, lokasi TPS Desa Trusmi Wetan yang kurang strategis, serta beberapa oknum masyarakat yang masih membuang sampah di sungai.

4. Upaya yang dikemukakan dalam pembahasan adalah upaya yang telah dilakukan oleh *stakeholders* program desa sadar hukum dan upaya yang ditawarkan oleh peneliti sebagai alternatif solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu penggunaan dana mandiri dalam operasionalisasi program untuk mengatasi kekurangan dana, membuat grup di media sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada aparat desa untuk mengatasi keterlambatan pengumpulan data dan masalah teknis yang belum dimengerti aparat desa, pengadaan bimbingan teknis bagi aparat desa untuk mengatasi masalah teknis yang belum dimengerti aparat desa, dan pemberdayaan petugas kebersihan desa dan pembuatan oven sampah untuk mengatasi masalah penumpukan sampah di TPS Desa Trusmi Wetan, Upaya-upaya lain yang ditawarkan peneliti yaitu melakukan pengecekan data dan observasi mendalam ke berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi ketidaksesuaian data dan fakta, mengadakan bimbingan teknis berkelanjutan dengan pendekatan andragogi untuk mengatasi masalah teknis yang belum dimengerti aparat desa, pengadaan bank sampah di Desa Trusmi Wetan untuk mengatasi masalah penumpukan sampah, serta upaya meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan sejak dini.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini membawa implikasi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan program desa sadar hukum menunjukkan bahwa setiap program atau kebijakan pasti melalui proses perencanaan sebelum dilaksanakan. Perencanaan tersebut membuat program berjalan secara terarah dan terstruktur. Kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah juga memiliki tujuan tertentu, begitu pun program desa sadar hukum yang dibuat dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dapat memberikan pedoman kepada setiap desa guna meningkatkan kesadaran

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hukum pada masyarakat. Proses pelaksanaan akan berjalan dengan optimal jika seluruh *stakeholders* berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan pedoman pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala BPHN No. PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Pelaksanaan program harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen, serta mengedepankan kejujuran, koordinasi, dan komunikasi yang baik dari semua pihak.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program dari beberapa aspek. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Faktor penyebab hambatan pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan yang telah dikemukakan oleh peneliti bisa dijadikan referensi baik bagi Aparat Desa Trusmi Wetan atau aparat desa lainnya agar mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menghambat pelaksanaan program desa sadar hukum, sehingga dapat melakukan tindakan antisipatif sebelum melaksanakan program desa sadar hukum.
4. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dapat dilakukan oleh pihak lain yang menerapkan program yang sama dengan menghadapi kendala yang serupa. Upaya yang ditawarkan oleh peneliti pun dapat menjadi masukan bagi aparat desa maupun masyarakat Desa Trusmi Wetan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum bisa ditemukan solusinya.

5.3. Rekomendasi

Peneliti mengemukakan beberapa rekomendasi berkaitan dengan implementasi Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, di antaranya sebagai berikut.

5.3.1. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Program desa sadar hukum merupakan program yang sangat tepat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena program tersebut sudah meliputi kriteria dan kegiatan yang sangat sesuai untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, namun demikian masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai pelaksanaan program desa sadar hukum di Jawa Barat. Menurut peneliti, hal-hal yang harus dilakukan untuk menambah eksistensi dan efektivitas program desa sadar hukum di antaranya:

1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat hendaknya meningkatkan sosialisasi program desa sadar hukum kepada masyarakat dan juga desa-desa atau kelurahan-kelurahan agar program tersebut dikenal dan diketahui oleh masyarakat dan memotivasi desa-desa/ kelurahan-kelurahan di Jawa Barat untuk mengikuti program tersebut.
2. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat hendaknya memperbanyak kegiatan penyuluhan hukum dalam berbagai bentuk seperti ceramah, temu sadar hukum, hingga lomba kadarkum.

5.3.2. Bagi Bagian Hukum Kabupaten Cirebon

Bagian Hukum Kabupaten Cirebon juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan program desa sadar hukum di Kabupaten Cirebon karena merupakan perpanjangan tangan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, sehingga hal-hal yang harus dilakukan oleh Bagian Hukum Kabupaten Cirebon di antaranya:

1. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan desa-desa, serta kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan partisipasi setiap desa/ kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait penyuluhan hukum.
2. Melakukan pengawasan secara intens kepada desa-desa binaan terkait kegiatan desa sadar hukum, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang di lakukan oleh aparat desa sudah berjalan dan sesuai dengan prosedur.

5.3.3. Bagi Aparat Desa Trusmi Wetan

Aparat Desa Trusmi Wetan sebagai target sasaran program desa sadar hukum tentunya memiliki peran yang penting, karena penyelenggaraan kegiatan program desa sadar hukum bukan hanya ditujukan bagi aparat desa, akan tetapi masyarakat desa, sehingga yang harus dilakukan oleh aparat desa di antaranya:

1. Aparat Desa Trusmi Wetan hendaknya menyosialisasikan program desa sadar hukum kepada masyarakat, karena yang menjadi target dari program tersebut adalah masyarakat.
2. Aparat Desa Trusmi Wetan hendaknya aktif mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan, tidak hanya menunggu kegiatan yang diadakan oleh panitia pusat dan daerah.
3. Aparat Desa Trusmi Wetan hendaknya dapat menggerakkan masyarakat desa agar bisa berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan program desa sadar hukum.
4. Aparat Desa Trusmi Wetan hendaknya membuat rencana tindak lanjut, dari pencapaian status desa sadar hukum yang telah diraih oleh Desa Trusmi Wetan.

5.3.4. Bagi Masyarakat Desa Trusmi Wetan

Peran masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum masih kurang dominan, karena sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan penyuluhan yang telah mereka ikuti adalah rangkaian kegiatan dari program desa sadar hukum. Untuk itu, masyarakat Desa Trusmi Wetan hendaknya:

1. Kritis dalam menanggapi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa.
2. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan pemerintah desa.
3. Menyebarkan informasi yang didapatkan dari kegiatan penyuluhan, karena tidak semua masyarakat mengikuti kegiatan penyuluhan.
4. Mempertahankan kesadaran dalam membayar pajak, menjaga keamanan dan ketertiban Desa Trusmi Wetan.
5. Meningkatkan kesadaran dalam menaati peraturan dan menjaga kebersihan lingkungan.

5.3.5. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Puspa Yuliasari, 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BPHN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM MELALUI PROGRAM DESA SADAR HUKUM (Studi Deskriptif Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai departemen dengan multi disiplin ilmu memberikan peluang dan menginspirasi mahasiswa dalam mengambil tema dari berbagai disiplin ilmu dalam penelitian. Hal tersebut membuat peneliti bersyukur karena dalam mencari tema penelitian tidak terbatas pada bidang pendidikan saja. Hukum dan kebijakan publik sebagai dua disiplin ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup dua disiplin ilmu tersebut. Untuk itu, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya:

1. Mengintensifkan kajian-kajian mengenai hukum khususnya terkait kesadaran hukum masyarakat dalam studi kajian di perkuliahan.
2. Memperdalam kajian-kajian mengenai kebijakan publik khususnya terkait implementasi dan analisis kebijakan publik dalam studi kajian di perkuliahan.
3. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik untuk meneliti mengenai implementasi program/kebijakan publik.

5.3.6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai pengimplementasian Peraturan Kepala BPHN tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan masih terdapat kekurangan, baik dari segi ruang lingkup atau dari segi metode penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terkait pengimplementasian program desa sadar hukum dengan menitikberatkan pada segi efektivitas dengan pendekatan dan metode yang berbeda. Di samping itu, mulai tahun 2018 terdapat kriteria dan teknis yang baru dalam pelaksanaan program desa sadar hukum, sehingga perlu kiranya dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana implementasinya, dimana letak perbedaannya, dan sejauh mana efektivitasnya jika dibandingkan dengan kriteria dan teknis yang sebelumnya.